POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2025 DI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

Jo Gilberd Elly Wondoy
NPP. 33.1127
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: gilberdwondoy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si
Email:hapritarigan@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *There is a gap between the democratic principles of village head elections and the reality that voter choices in Yendidori are still strongly influenced by clan-based identity politics.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze how identity politics influences the 2025 village head election in Yendidori District, Biak Numfor Regency, and to identify the factors that drive communities to make identity-based political choices.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative approach with purposive sampling of informants, including district apparatus, customary leaders, community leaders, and youth figures. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings show that clan-based identity politics plays a dominant role in the village head election through the dimensions of identity of difference, inclusion–exclusion, political mobilization, as well as distribution and power. Voters tend to support candidates from the same clan due to cultural–customary factors, trust and expectations of access to resources, social pressure and obedience to traditional leaders, as well as limited political literacy. This condition places local democracy in Yendidori District in a transitional phase, where participation is high, but the rationality of voters and the fairness of distribution remain strongly influenced by kinship-based logic.* ***Conclusion:*** *Based on these findings, it is necessary to enhance political literacy through continuous political education so that voters can make more rational choices. Local governments and election organizers are expected to strengthen supervision over identity-based political practices that may lead to inequality. In addition, the role of customary and community leaders should be optimized as unifying agents to promote a more inclusive and equitable democratic process.*
Keywords: *identity politics, clan, village head election, local democracy, Yendidori.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Terdapat kesenjangan antara prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala kampung dengan realitas pilihan masyarakat yang masih didominasi oleh politik identitas berbasis marga di Distrik Yendidori. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana politik identitas dalam proses pemilihan kepala kampung tahun 2025 di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat menentukan pilihan politik berbasis identitas. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive yang meliputi aparat distrik, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan

studi dokumen, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berbasis marga berperan dominan dalam pemilihan kepala kampung melalui dimensi identitas perbedaan, inklusi–eksklusi, mobilisasi politik, serta distribusi dan kekuasaan. Masyarakat cenderung memilih calon semarga karena faktor kultural–adat, kepercayaan dan harapan akses sumber daya, tekanan sosial dan kepatuhan terhadap tetua, serta keterbatasan literasi politik. Kondisi ini menempatkan demokrasi lokal di Distrik Yendidori pada fase transisi, di mana partisipasi tinggi, tetapi kualitas rasionalitas pemilih dan keadilan distribusi masih dipengaruhi kuat oleh logika kekerabatan. **Kesimpulan:** Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan literasi politik masyarakat melalui pendidikan politik yang berkelanjutan agar pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilihan perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik politik identitas yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, peran tokoh adat dan tokoh masyarakat perlu dioptimalkan sebagai agen pemersatu guna mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kata kunci: politik identitas, marga, pemilihan kepala kampung, demokrasi lokal, Yendidori.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik identitas merupakan strategi mobilisasi politik yang menggunakan atribut sosial seperti etnis, agama, asal wilayah, atau kelompok kekerabatan sebagai dasar memperoleh dukungan politik. Fenomena ini menjadi isu global yang memengaruhi demokrasi di berbagai negara (Huda & Maksum, 2024). Politik identitas umumnya muncul ketika kelompok masyarakat merasa aspirasi dan kepentingannya kurang terakomodasi dalam sistem politik. Dalam kondisi tersebut, identitas sosial digunakan untuk memperkuat solidaritas kelompok dan memperluas pengaruh politik. Politik identitas memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, dapat memperkuat penghargaan terhadap keberagaman dan memperjuangkan pengakuan hak kelompok tertentu. Di sisi lain, berpotensi menimbulkan perpecahan sosial, memperdalam polarisasi, serta menggeser perhatian publik dari isu kebijakan ke isu identitas yang bersifat emosional dan eksklusif (Huda & Maksum, 2024). Menurut Buchari (2014), kebangkitan identitas etnis merupakan respons kelompok terhadap kebutuhan akan pengakuan dan representasi dalam ruang politik. Identitas kemudian berkembang menjadi instrumen politik yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sekaligus memperoleh akses terhadap kekuasaan.

Identitas sosial menjadi alat politik yang kuat karena mengandung nilai emosional dan rasa kebersamaan yang mampu membangun loyalitas pemilih, terutama ketika masyarakat merasa termarginalkan atau kurang terwakili (Puansah et al., 2024). Rozi dkk. (2019) menjelaskan bahwa politik identitas pada dasarnya merupakan proses politik yang menempatkan kesamaan identitas sebagai dasar pembentukan solidaritas dan tindakan kolektif dalam mencapai tujuan politik tertentu. Secara global, politik identitas cenderung menguat ketika persaingan politik meningkat dan institusi demokrasi belum sepenuhnya kuat. Mobilisasi identitas berbasis etnis dan agama menjadi strategi yang sering digunakan elite politik untuk mengonsolidasikan dukungan kelompok tertentu (Rahmadhani, 2025). Kondisi ini berpotensi meningkatkan polarisasi sosial dan menurunkan kualitas demokrasi karena diskursus publik bergeser dari isu kebijakan ke isu identitas (Rahmadhani et al., 2024). Muhtadi (2019) menegaskan bahwa menguatnya politik identitas dalam kontestasi elektoral sering berkaitan dengan munculnya populisme yang memanfaatkan sentimen kelompok untuk memperoleh legitimasi politik dan dukungan massa.

Di Indonesia, politik identitas semakin menguat pascareformasi, terutama dalam pemilu dan pilkada. Isu agama, suku, dan kedaerahan sering dimanfaatkan untuk membangun citra kandidat dan menarik simpati pemilih. Identitas etnis dan agama terbukti berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat (Yunus, 2023), bahkan telah menjadi strategi permanen dalam kontestasi politik elektoral melalui penggunaan sentimen primordial oleh elite politik (Said, 2023). Dalam konteks demokrasi lokal, mekanisme pemilihan langsung memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, namun juga membuka peluang semakin kuatnya pengaruh identitas sosial dalam proses kompetisi politik (Labolo, 2016).

Di Papua, politik identitas memiliki karakteristik khusus karena masyarakatnya berakar kuat pada sistem kekerabatan adat. Struktur adat dan genealogis menjadikan tokoh adat serta kepala suku memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik masyarakat (Usfunan & Pondayar, 2022). Akibatnya, dukungan politik sering dibangun berdasarkan ikatan etnis, marga, dan adat, sehingga pertimbangan rasional seperti visi, program, dan rekam jejak calon cenderung dikesampingkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kelompok masih menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat Papua (Usfunan & Pondayar, 2022). Sejalan dengan itu, Khakim (2025) menjelaskan bahwa identitas berbasis marga tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi sarana pembentukan ketahanan politik dan solidaritas sosial dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, politik identitas di Papua perlu dipahami sebagai interaksi antara nilai budaya, sistem kekerabatan, dan dinamika demokrasi lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan kuatnya pengaruh politik identitas berbasis marga dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Meskipun secara normatif pemilihan kepala kampung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang menekankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan, marga, dan adat. Kondisi ini menyebabkan pertimbangan rasional seperti visi, misi, program kerja, dan kapasitas calon sering kali berada di posisi kedua dibandingkan loyalitas terhadap kelompok identitas. Selain itu, adanya pengaruh tokoh adat, tekanan sosial dalam komunitas, serta harapan memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya melalui calon yang berasal dari marga yang sama semakin memperkuat praktik politik identitas dalam kontestasi politik lokal.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas politik identitas dalam konteks pemerintahan daerah, parlemen lokal, pemekaran wilayah, pemilu nasional, maupun pilkada berbasis etnis di berbagai daerah di Indonesia dan Papua, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji politik identitas berbasis marga pada tingkat pemilihan kepala kampung di Kabupaten Biak Numfor, khususnya Distrik Yendidori. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti representasi politik, patronase, konflik identitas, atau politik identitas pada level pemerintahan yang lebih luas, sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana identitas marga dimobilisasi dalam pemilihan kepala kampung, faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih berdasarkan identitas, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara spesifik peran politik identitas berbasis marga, proses mobilisasi dukungan politik, dan implikasinya terhadap demokrasi lokal di Distrik Yendidori.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh politik identitas berbasis marga dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, mengingat kuatnya ikatan kekerabatan dan adat yang masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya mengenai dinamika demokrasi lokal di Papua yang masih dipengaruhi oleh identitas sosial, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, dan tokoh adat dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kapasitas calon pemimpin. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong pilihan politik berbasis identitas serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal akan tetap terbatas, sehingga kebijakan dan upaya pendidikan politik yang dirancang berpotensi tidak tepat sasaran. Akibatnya, praktik politik identitas yang berlebihan dapat terus berkembang, memperkuat polarisasi antarkelompok masyarakat, menghambat terwujudnya kompetisi politik yang sehat, serta mengurangi peluang terpilihnya pemimpin kampung berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam mewujudkan pembangunan kampung yang berkeadilan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji politik identitas dalam berbagai konteks politik lokal di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian politik identitas memiliki variasi fokus, objek penelitian, serta pendekatan yang digunakan. Secara konseptual, politik identitas muncul ketika individu mengubah identitas sosial menjadi identitas politik yang digunakan sebagai dasar tindakan kolektif dan preferensi politik dalam suatu kelompok (Huddy, 2001). Dalam konteks demokrasi lokal, identitas sering menjadi instrumen mobilisasi politik yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat.

Jonny Ricardo Kocu meneliti praktik politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik identitas dan patronase pemerintahan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pengangkatan kepala kampung tanpa mekanisme demokratis serta politisasi birokrasi berbasis identitas dan patronase telah melemahkan demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan (Kocu, 2021). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Barrul Fuad (2014) yang menjelaskan bahwa politik identitas dalam demokrasi Indonesia sering digunakan sebagai sarana memperoleh legitimasi politik melalui kedekatan sosial, budaya, maupun kelompok tertentu sehingga berpengaruh terhadap proses elektoral di tingkat lokal.

Martinus Wika mengkaji politik identitas dan representasi inklusif dalam partisipasi Suku Marind di parlemen lokal Merauke dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik masyarakat adat Marind masih bersifat simbolis dan belum mampu memperjuangkan kepentingan substantif komunitas adat secara optimal karena dominasi elite non-Marind, lemahnya regulasi afirmatif, dan fragmentasi internal komunitas (Wika, 2025). Hasil tersebut menunjukkan bahwa identitas kelompok tidak selalu menghasilkan representasi politik yang substantif, melainkan sering kali hanya menjadi simbol politik yang digunakan dalam proses perebutan kekuasaan.

Penelitian I Ngurah Suryawan membahas peran identitas budaya dalam kebijakan penataan daerah di Provinsi Papua Barat menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah yang didorong kepentingan politik dan ekonomi elit justru memicu fragmentasi sosial, konflik identitas, dan marginalisasi masyarakat asli Papua karena kurang memperhatikan kompleksitas sosial budaya masyarakat setempat (Suryawan, 2014). Temuan ini

memperlihatkan bahwa identitas budaya memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya politik di masyarakat.

Selanjutnya, Miftahul Huda N.M. dan Muh. Nur Rochim Maksum meneliti peran politik identitas dalam Pemilu di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif politik identitas dan ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memiliki dampak ganda, yaitu mampu memperkuat solidaritas kelompok, namun juga berpotensi menimbulkan polarisasi dan konflik sosial apabila digunakan secara eksklusif dalam kontestasi politik (Huda & Maksum, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Azizah (2023) yang menunjukkan bahwa personifikasi elite agama dan identitas kelompok masih menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam pemilihan di Indonesia, sehingga preferensi politik sering kali tidak hanya didasarkan pada program dan kapasitas kandidat, tetapi juga pada kedekatan identitas yang dimiliki.

Adapun Nofriadi, Afrijal, dan Isti Nindiah meneliti politik identitas etnis dalam Pilkada Aceh Tahun 2017 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik identitas etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi identitas etnis Gayo melalui narasi putra daerah menjadi strategi yang efektif dalam memperoleh dukungan politik dan memenangkan kontestasi elektoral di wilayah basis etnis tersebut (Nofriadi, Afrijal, & Nindiah, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Misbahuddin, Hawing, dan Muhiddin (2023) yang menjelaskan bahwa politik identitas memiliki pengaruh signifikan terhadap elektabilitas kandidat dalam pemilihan kepala desa, karena kedekatan identitas sosial mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pemilih terhadap calon tertentu. Selain itu, penelitian Alfirdaus dan Bria (2020) mengenai politik identitas berbasis suku dalam pemilihan kepala desa di Desa Wederok, Kabupaten Malaka, menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan dan identitas kelompok menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat dibandingkan pertimbangan rasional terhadap visi, misi, maupun kapasitas calon pemimpin.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji politik identitas berbasis marga dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang hingga saat ini belum banyak diteliti pada level demokrasi kampung di Papua. Jika penelitian Jonny Ricardo Kocu (2021) berfokus pada praktik politik identitas dan patronase dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maybrat, Martinus Wika (2025) meneliti representasi politik Suku Marind dalam parlemen lokal Merauke, I Ngurah Suryawan (2014) mengkaji identitas budaya dalam pemekaran daerah Papua Barat, serta Nofriadi dkk. (2023) dan Huda & Maksum (2024) menyoroti politik identitas dalam konteks pilkada dan pemilu, maka penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana identitas marga berperan dalam menentukan perilaku memilih masyarakat pada pemilihan kepala kampung. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori politik identitas Agnes Heller dan Donald L. Horowitz yang dioperasionalkan melalui empat dimensi analisis, yaitu identitas perbedaan (identity of difference), inklusi–eksklusi (inclusion–exclusion), mobilisasi politik (political mobilization), serta distribusi dan kekuasaan (distribution and power) untuk menjelaskan fenomena politik identitas di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pilihan politik berbasis identitas, seperti faktor kultural-adat, kepercayaan terhadap marga, tekanan sosial dari tetua adat, serta keterbatasan literasi politik masyarakat, sehingga memberikan kontribusi empiris baru dalam pengembangan kajian politik identitas dan demokrasi lokal di wilayah Papua.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas berperan dalam proses Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena politik identitas dalam pemilihan kepala kampung tahun 2025 di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan perilaku politik, nilai adat, identitas marga, serta hubungan sosial masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami berdasarkan makna dan pengalaman para pelaku sosial (Sugiyono, 2022). Penelitian dilakukan di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan struktur kekerabatan dan adat yang masih kuat sehingga politik identitas berbasis marga tampak dominan dalam proses pemilihan kepala kampung. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan terdiri atas Kepala Distrik Yendidori, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Kepala Distrik Yendidori dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan administratif serta memahami dinamika sosial-politik masyarakat secara menyeluruh, sedangkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dipilih karena berperan langsung dalam proses pembentukan opini, mobilisasi dukungan politik, dan pelestarian nilai-nilai kekerabatan yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik politik identitas dalam pemilihan kepala kampung.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen penelitian guna meningkatkan kredibilitas temuan (Moleong, 2017). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan. Teknik analisis ini dipilih karena mampu mengungkap hubungan antara identitas marga, mobilisasi politik, dan perilaku memilih masyarakat secara sistematis. Penelitian dilaksanakan selama tahun akademik 2025/2026 dengan kegiatan penelitian lapangan dan pengumpulan data utama berlangsung pada Januari 2026 di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, yang mencakup proses observasi, wawancara mendalam dengan para informan, serta pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan pemilihan kepala kampung tahun 2025. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual mengenai pengaruh politik identitas berbasis marga terhadap kualitas demokrasi lokal di Distrik Yendidori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan dimensi-dimensi politik identitas dan faktor-faktor perilaku memilih yang telah dioperasionalisasikan dalam Bab III. Dalam penyajian hasil, peneliti menggunakan kode I1 sampai dengan I5 untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, sekaligus memudahkan penelusuran pandangan dan kutipan pernyataan mereka dalam analisis.

3.1 Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Kampung di Distrik Yendidori

Secara normatif, pemilihan kepala kampung di Kabupaten Biak Numfor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menegaskan bahwa pemilihan harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan, karena praktik politik identitas berbasis marga masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam setiap tahapan pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori. Informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Drs. I Putu Wiadnyana, M.M., menyampaikan bahwa secara prosedural pemilihan telah mengikuti ketentuan yang berlaku, tetapi pengaruh adat, marga, dan tokoh lokal masih sangat kuat dalam membentuk pilihan politik masyarakat.

Tabel 1.
Daftar Nama Kepala Kampung Terpilih Periode 2026–2034 Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor

No	Nama Kampung	Nama Kepala Kampung
1	Yendidori	Soleman A. Aibekoi
2	Samber	Karel Mansnembra
3	Birubi	Frans Asyerem
4	Wirmaker	Yohan Osem
5	Inpendi	Yan S.W. Korwa
6	Adoki	Steven A. Yapen
7	Urfu	Bernard Kaisiri
8	Padwa Pantai	Dince B. Sawaa
9	Binyeri	Abraham Msen
10	Rarpimdo	Yance Dimara
11	Padwa	Alberth Swabra
12	Sunyar	Tonny S. Ayer
13	Kabidon	Frans Yarangga, S.IP.
14	Samber Sup	Isak Mirino
15	Syabes	Yoram Pariaribo
16	Moibaken	Lesias Penasifu
17	Suneri	Yakobus Asyerem
18	Amyambenram	Frits Ayer
19	Waroi	Matias Kapisa

Sumber: Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 202/188.4.5 Tahun 2026, tanggal 9 April 2026.

Berdasarkan Tabel 1. pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori telah menghasilkan 19 kepala kampung terpilih untuk periode 2026–2034. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pemilihan telah dilaksanakan di seluruh kampung yang berada di wilayah Distrik Yendidori sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis, pengaruh politik identitas dalam pemilihan kepala kampung dapat dilihat melalui empat dimensi utama, yaitu: (1) identitas perbedaan (identity of difference), (2) inklusi–eksklusi (inclusion–exclusion), (3) mobilisasi politik (political mobilization), serta (4) distribusi dan kekuasaan (distribution and power).

Sebelum keempat dimensi tersebut dianalisis, perlu dipahami mekanisme penetapan calon kepala kampung. Secara formal, Bamuskam membentuk panitia pemilihan, melakukan verifikasi administrasi bakal calon, menetapkan calon resmi, serta memberikan kesempatan kampanye sebelum pemungutan suara. Namun dalam praktiknya, jauh sebelum tahapan resmi dimulai, calon kepala

kampung umumnya telah memperoleh restu dari tokoh adat atau tetua marga masing-masing. Akibatnya, penetapan formal sering kali hanya menjadi legitimasi atas kesepakatan yang telah terbentuk dalam komunitas marga. Kondisi ini menjadi pintu masuk kuatnya pengaruh politik identitas dalam keseluruhan proses pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori.

3.1.1 Identitas Perbedaan (Identity of Difference)

Setiap masyarakat pada dasarnya membentuk batas-batas sosial yang membedakan dirinya dari kelompok lain. Dalam konteks politik lokal, batas sosial tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berfungsi nyata dalam membentuk pilihan dan arah dukungan politik. Identitas perbedaan (identity of difference) menjadi salah satu dimensi penting untuk memahami bagaimana masyarakat menggunakan identitas kelompok sebagai dasar pengambilan keputusan politik. Di Distrik Yendidori, identitas marga merupakan penanda perbedaan yang paling kuat dalam pemilihan kepala kampung. Marga tidak hanya menjadi nama keluarga, tetapi juga merepresentasikan nilai, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kontestasi politik, identitas marga menjadi tolok ukur utama dalam menilai calon, bahkan sebelum program dan kapasitasnya dipertimbangkan.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pola dukungan pemilih cenderung mengelompok pada kandidat yang memiliki basis marga kuat. Masyarakat lebih memilih calon yang berasal dari marga yang sama atau memiliki hubungan kekerabatan dekat karena dianggap lebih memahami kepentingan kelompoknya. Tokoh adat Yendidori, Paulus Mambrasar, menegaskan bahwa masyarakat pertama kali melihat marga calon sebelum mempertimbangkan programnya. Kepercayaan muncul karena adanya ikatan kekeluargaan yang telah terbangun lama serta harapan bahwa pemimpin semarga akan lebih memperhatikan kebutuhan kelompoknya.

Pandangan serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat merasa lebih nyaman apabila kepala kampung berasal dari “orang kita”, yaitu masih satu garis marga atau keluarga besar. Kedekatan emosional dan hubungan sosial yang telah terjalin lama membuat masyarakat lebih percaya bahwa pemimpin tersebut memahami kondisi dan kebutuhan lokal secara mendalam. Secara teoritis, Agnes Heller menjelaskan bahwa identitas perbedaan muncul ketika kelompok sosial menegaskan eksistensinya melalui simbol, nilai, dan budaya yang membedakannya dari kelompok lain. Donald L. Horowitz menambahkan bahwa identitas kelompok sering menjadi basis utama kompetisi politik karena memiliki kekuatan emosional yang tinggi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunus yang menunjukkan bahwa identitas etnis dan kultural berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih, terutama pada masyarakat yang masih kuat dengan sistem kekerabatan.

Dengan demikian, identitas perbedaan dalam pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori berfungsi sebagai mekanisme pembentukan preferensi politik kolektif. Identitas marga menjadi pembeda utama yang membentuk batas antar kelompok sekaligus menjadi dasar legitimasi dalam menentukan pemimpin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat masih lebih dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional dibandingkan pertimbangan rasional berbasis program dan kapasitas calon. Oleh karena itu, dimensi identitas perbedaan (identity of difference) termanifestasi secara kuat melalui dominasi marga dalam menentukan arah pilihan politik masyarakat.

3.1.2 Inklusi–Eksklusi (Inclusion–Exclusion)

Salah satu konsekuensi dari kuatnya identitas kelompok dalam kehidupan politik adalah terbentuknya batas sosial antara kelompok “kita” dan “mereka”. Batas ini tidak selalu menimbulkan konflik terbuka, tetapi memengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap, dan menentukan dukungan politik. Dalam kajian politik identitas, proses ini dikenal sebagai dimensi inklusi–eksklusi (inclusion–exclusion), yaitu mekanisme yang menentukan siapa yang dianggap bagian dari kelompok dan siapa

yang diposisikan sebagai pihak luar. Dalam pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori, kesamaan marga menjadi faktor utama dalam menentukan kepercayaan dan dukungan politik. Calon yang berasal dari marga berbeda, meskipun memiliki kapasitas dan program yang baik, sering menghadapi hambatan sosial yang memengaruhi perolehan suara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas marga menjadi dasar utama pembentukan batas sosial tersebut. Dukungan politik cenderung bersifat eksklusif dan terkonsentrasi pada kelompok marga tertentu, sedangkan calon dari marga lain sering dipandang dengan keraguan. Kepala Distrik Yendidori, Mesak N.Z. Mandowen, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan bahwa pola suara masyarakat terlihat mengelompok sesuai dominasi marga di masing-masing wilayah. Dengan demikian, dukungan politik tidak hanya didasarkan pada figur calon, tetapi juga pada kelompok yang merasa diwakili. Tokoh masyarakat Brian Aibekob juga menjelaskan bahwa menjelang pemilihan sering muncul ajakan untuk tidak memecah suara dan mendukung "orang kita". Pernyataan tersebut menunjukkan adanya garis pembatas antara kelompok "kita" dan "mereka", meskipun tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Batas tersebut tetap terasa dalam cara masyarakat berbicara dan bersikap selama proses pemilihan.

Temuan ini sejalan dengan teori Horowitz yang menyatakan bahwa dalam masyarakat plural, politik identitas cenderung menghasilkan polarisasi melalui pembentukan batas yang tegas antar kelompok sosial. Penelitian di Papua juga menunjukkan bahwa identitas budaya yang dikelola secara sempit dapat memicu fragmentasi dan konflik apabila tidak diimbangi dengan mekanisme integrasi sosial yang kuat. Dengan demikian, dimensi inklusi–eksklusi dalam pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi deliberatif, terbatasnya interaksi politik lintas kelompok, serta meningkatnya potensi konflik sosial apabila hasil pemilihan tidak sesuai dengan harapan salah satu marga. Demokrasi memang berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya substantif karena ruang publik masih lebih banyak diwarnai oleh pertarungan identitas daripada diskusi mengenai program dan kapasitas calon.

3.1.3 Mobilisasi Politik (Political Mobilization)

Dimensi mobilisasi politik menggambarkan bagaimana identitas marga berfungsi sebagai alat strategis untuk menggerakkan dukungan kolektif dalam pemilihan kepala kampung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi sentral sebagai rujukan utama masyarakat dalam menentukan pilihan. Tokoh adat tidak hanya berperan sebagai pemimpin budaya, tetapi juga sebagai aktor politik informal yang mampu mengonsolidasikan dukungan kelompok melalui arahan langsung dan musyawarah adat. Tokoh adat Martinus Rumbiak menjelaskan bahwa sebelum pemilihan, keluarga besar biasanya mengadakan pertemuan untuk berdiskusi mengenai calon yang dianggap layak menjadi kepala kampung. Dalam proses tersebut, pandangan tokoh adat dan tokoh pemuda menjadi pertimbangan penting. Setelah tercapai kesepakatan, hasilnya disampaikan kepada seluruh anggota marga untuk diikuti sebagai satu suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan politik sering kali dibentuk secara kolektif melalui mekanisme adat dan hubungan kekerabatan.

Tokoh pemuda Martina Burwos juga mengakui bahwa arahan marga sangat memengaruhi sikap pemuda. Meskipun sebagian pemuda memiliki penilaian sendiri terhadap calon, mereka cenderung mengikuti keputusan keluarga karena adanya rasa sungkan apabila berbeda pilihan dengan orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Selain melalui arahan tokoh adat, mobilisasi politik dilakukan melalui jaringan kekerabatan dan berbagai kegiatan adat. Sekretaris Distrik Yendidori, Juliana T. Korwa, S.IP., menjelaskan bahwa kampanye tidak hanya berlangsung pada forum resmi, tetapi juga terjadi dalam acara keluarga, pertemuan adat, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dukungan terhadap calon tertentu sering disampaikan secara tidak langsung melalui ajakan yang bersifat persuasif. Pola komunikasi ini membuat pesan politik lebih mudah diterima karena disampaikan dalam suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan.

Secara keseluruhan, mobilisasi politik berbasis identitas marga mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman mengenai program dan kapasitas calon. Temuan ini sejalan dengan pandangan Huda dan Maksum yang menyatakan bahwa politik identitas dapat meningkatkan partisipasi politik, tetapi pada saat yang sama dapat mengurangi rasionalitas pemilih karena keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh solidaritas kelompok dan faktor emosional. Dengan demikian, dimensi mobilisasi politik (political mobilization) di Distrik Yendidori termanifestasi melalui peran tokoh adat, jaringan kekerabatan, dan kegiatan sosial adat sebagai sarana utama dalam menggerakkan dukungan politik masyarakat.

3.1.4 Distribusi dan Kekuasaan (Distribution and Power)

Dimensi distribusi dan kekuasaan menunjukkan bahwa pemilihan kepala kampung di Distrik Yendidori tidak hanya berkaitan dengan kompetisi politik, tetapi juga berhubungan dengan harapan masyarakat terhadap distribusi sumber daya, pembangunan, dan akses kekuasaan. Hasil wawancara menunjukkan adanya ekspektasi bahwa kemenangan calon dari marga tertentu akan membawa manfaat bagi kelompoknya, baik dalam bentuk pembangunan, program pemerintah, maupun kesempatan menduduki jabatan di tingkat kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Drs. I Putu Wiadnyana, M.M., menyampaikan bahwa di masyarakat terdapat anggapan bahwa kepala kampung yang berasal dari marga tertentu akan lebih mengutamakan kelompok marganya dalam memperoleh program atau bantuan. Meskipun secara aturan hal tersebut tidak dibenarkan, persepsi tersebut tetap ada dan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mendukung calon dari kelompoknya sendiri.

Pandangan serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat Brian Aibekob yang menjelaskan bahwa setelah pemilihan sering muncul penilaian terhadap kepala kampung terkait keadilan dalam pembagian bantuan, proyek kerja, maupun program pembangunan. Jika manfaat pembangunan lebih banyak diterima oleh satu marga tertentu, marga lain dapat merasa tidak diperhatikan sehingga memunculkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, kepala kampung dituntut untuk bersikap adil dan menjaga keseimbangan agar hubungan antar marga tetap harmonis.

Total suara sah berjumlah 746 suara dengan lima kandidat yang bersaing. Dua kandidat memperoleh suara sangat tinggi dan relatif berimbang, yaitu 226 dan 224 suara, sementara kandidat lainnya memperoleh 181, 64, dan 51 suara. Sebaran suara yang terkonsentrasi pada beberapa kandidat utama menunjukkan adanya blok-blok dukungan yang kuat berbasis kelompok sosial, yang dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan identitas marga. Dari perspektif analisis politik, praktik distribusi kekuasaan berbasis identitas memiliki implikasi yang kompleks. Menurut Horowitz, praktik ini dapat memperkuat solidaritas internal kelompok karena adanya manfaat yang dirasakan oleh kelompok pemenang. Namun di sisi lain, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses, memperkuat patronase, dan mengurangi prinsip keadilan dalam demokrasi lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Papua yang menunjukkan bahwa politik identitas yang tidak dikelola secara inklusif dapat memicu fragmentasi sosial dan melemahkan kohesi masyarakat.

Secara keseluruhan, keempat dimensi politik identitas menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Distrik Yendidori berada dalam situasi transisi, di mana nilai-nilai tradisional berbasis marga dan adat berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi elektoral modern. Politik identitas terbukti menjadi sumber solidaritas dan partisipasi politik, tetapi pada saat yang sama berpotensi menurunkan kualitas demokrasi substantif apabila tidak diimbangi dengan pendidikan politik dan tata kelola yang inklusif.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berbasis marga berperan dominan dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori. Dominasi tersebut terlihat melalui

dimensi identitas perbedaan, inklusi–eksklusi, mobilisasi politik, serta distribusi dan kekuasaan. Masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada calon yang berasal dari marga yang sama karena adanya ikatan kekerabatan, loyalitas adat, serta harapan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan pembangunan kampung. Selain itu, tokoh adat dan keluarga besar memiliki peran penting dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan konsolidasi suara kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan identitas marga sering kali lebih dominan dibandingkan penilaian terhadap visi, misi, maupun kapasitas calon pemimpin. Sama halnya dengan temuan Nofriadi, Afrijal, dan Isti Nindiah (2023) yang menemukan bahwa politik identitas etnis menjadi faktor penting dalam kemenangan pasangan Irwandi–Nova pada Pilkada Aceh melalui mobilisasi identitas kelompok sebagai alat memperoleh dukungan politik. Temuan ini juga memperkuat penelitian Jonny Ricardo Kocu (2021) yang menunjukkan bahwa politik identitas masih menjadi instrumen utama dalam dinamika politik lokal di Papua, terutama dalam masyarakat yang memiliki ikatan adat dan kekerabatan yang kuat.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa faktor kultural dan adat, kepercayaan terhadap calon semarga, tekanan sosial dan kepatuhan terhadap tetua, serta rendahnya literasi politik menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat menentukan pilihan politik berdasarkan identitas marga. Rendahnya akses informasi mengenai program dan rekam jejak calon menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan identitas sosial yang dianggap paling dekat dan terpercaya dalam menentukan pilihan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Miftahul Huda dan Muh. Nur Rochim Maksum (2024) yang menyatakan bahwa politik identitas mampu memperkuat solidaritas kelompok dan menjadi sarana mobilisasi politik yang efektif. Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Martinus Wika (2025) yang menyoroti representasi politik identitas pada tingkat parlemen lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada level pemilihan kepala kampung, politik identitas tidak hanya berfungsi sebagai simbol representasi kelompok, tetapi telah menjadi determinan utama perilaku memilih masyarakat. Temuan ini juga memperkuat pandangan I Ngurah Suryawan (2014) bahwa identitas budaya dan kekerabatan di Papua masih memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses politik lokal, sehingga kualitas demokrasi substantif masih menghadapi tantangan akibat dominannya pertimbangan primordial dibandingkan pertimbangan rasional berbasis program dan kapasitas calon.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa selain faktor-faktor pendorong pilihan politik berbasis identitas, terdapat pula faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi dinamika demokrasi lokal di Distrik Yendidori. Faktor pendukung politik identitas meliputi kuatnya sistem kemargaan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calon semarga, serta peran tokoh adat dan keluarga besar dalam memobilisasi dukungan politik. Sementara itu, faktor penghambat terwujud dalam rendahnya literasi politik masyarakat, minimnya sosialisasi program dan visi-misi calon, serta kuatnya tekanan sosial dan budaya kepatuhan kepada tetua yang membatasi kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik secara rasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya memperkuat solidaritas dan partisipasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat terwujudnya demokrasi yang lebih objektif, inklusif, dan berbasis kapasitas calon pemimpin.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa politik identitas berbasis marga berperan dominan dalam pemilihan kepala kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, yang tercermin

melalui identitas perbedaan, inklusi–eksklusi, mobilisasi politik, serta distribusi dan kekuasaan. Masyarakat cenderung menentukan pilihan politik berdasarkan kesamaan marga, membentuk batas sosial antar kelompok, mengonsolidasikan dukungan melalui jaringan kekerabatan dan tokoh adat, serta memandang kemenangan calon dari marga tertentu sebagai sarana memperoleh akses yang lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya kampung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Papua. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan sangat bergantung pada perspektif informan yang diwawancarai.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada beberapa distrik atau kabupaten lain di Papua untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas mengenai politik identitas berbasis marga dalam pemilihan kepala kampung. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur secara lebih mendalam pengaruh identitas terhadap perilaku memilih masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Distrik Yendidori, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian berjudul “Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2025 di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua” dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfirdaus, L., & Bria, F. (2020). Identity politics within tribe in village government's head election: A case study in Wederok Village, Malaka Regency, East Nusa Tenggara. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 32–44. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i1.23761

Azizah, N. (2023). Personification of religious elite, political behavior and identity politics: A profile of regional elections in Indonesia. International Journal of Arts and Humanities Studies, 3(1). https://doi.org/10.32996/ijahs.2023.3.1.4

Barrul Fuad, A. B. (2014). Political identity and election in Indonesian democracy: A case study in Karang Pandan Village–Malang, Indonesia. Procedia Environmental Sciences, 20, 477–485. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.060

Buchari, S. A. (2014). Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Huddy, L. (2001). From social to political identity: A critical examination of social identity theory. Political Psychology, 22(1), 127–156. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00230

Khakim, M. S. (2025). Politik identitas budaya pada pemerintahan daerah: Peran pendidikan berbasis marga suku Batak dalam membangun ketahanan politik dan budaya. Jurnal Khatulistiwa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/5368/2142

Labolo, M. (2016). Menimbang kembali alternatif mekanisme pemilihan kepala daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 8(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79

Miftahul Huda N M, & Muh. Nur Rochim Maksum 2024. Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam di Indonesia : Studi Kasus Pemilu. Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(3), 159–166. https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.406

Misbahuddin, M., Hawing, H., & Muhiddin, A. (2023). The impact of political identity on candidate electability in village head elections. Journal of Contemporary Local Politics, 2(2). https://doi.org/10.46507/jclp.v2i2.464

Muhtadi, B. (2019). Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: Mengurai jalan panjang demokrasi prosedural. Intrans Publishing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. 2024. Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 8(1), 340. https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348

Rahmadhani, A., Tarigan, F. S. B., Gorat, L. M. B., Sinaga, N. N., & Zai, F. P. D. (2024). Politik Identitas dan Polarisasi Dalam Pemilu. Indonesian Journal of Education and Development Research, 3(1), 364–369. https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671

Rozi, S., dkk. (2019). Politik identitas. Bumi Aksara.

Said, R. W. (2023). FENOMENA POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU DI INDONESIA. Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 3(1), 44–51. https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D (2nd ed.). ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Usfunan, J. Z., & Yustus Pondayar. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua. JAPHTN-HAN, 1(2), 277–289. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.53

Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 9(2), 121–137. https://doi.org/10.29103/jsds.v9i2.12590